

REVITALISASI *CIVIC DISPOSITION* DALAM MEMPERKUAT PERSATUAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI

Sri Suneki
Srisuneki65@gmail.com

Abstrak

Civic disposition as citizenship knowledge has substantive and essential dimensions that emphasize the dimensions of the character, character, attitudes and potential of citizens, which are in the form of active and public characteristics, namely traits that individuals have acquired by means of learning and public character emerges because an individual interacts with other individuals. So that there is a mutualistic network of life. The new era of industrial revolution 4.0 is an era that glorifies technology as the basis of human life, this condition results in various impacts and consequences. Indonesia as a pluralistic country that strengthens unity amidst diversity must be able to adapt significantly to changes.

Keywords: Civic Disposition, Unity, Industrial Revolution Era

Abstrak

Civic disposition sebagai pengetahuan kewarganegaraan yang memiliki dimensi substantive dan esensial yang menekankan pada dimensi watak, karakter, sikap dan potensi yang dimiliki warga negara, yang berbentuk karakter privat dan *public* yaitu watak-watak yang telah dimiliki individu dengan cara belajar dan karakter *public* muncul karena seorang individu berinteraksi dengan individu yang lain. Sehingga terjalin jaringan kehidupan mutualistik. Era baru revolusi *industry* 4.0 merupakan era yang mengagungkan teknologi sebagai basis kehidupan manusia, kondisi tersebut mengakibatkan berbagai dampak dan konsekuensi. Indonesia sebagai negara pluralistik yang memperkuat persatuan di tengah keberagaman harus mampu adaptasi secara signifikan terhadap perubahan.

Kata kunci : *Civic Disposition*, Persatuan, Era Revolusi Industri

A. PENDAHULUAN

Dunia saat ini menghadapi era baru berupa globalisasi yang telah menciptakan ruang dimana negara tidak lagi menjadi satu satunya aktor dalam ekonomi politik global tetapi juga mendorong terjadinya perubahan antara lain perubahan kekuasaan politik, ekonomi sosial yang berkombinasi dengan pembentukan saling hubungan regional dan global yang lebih ekstensif dan intensif. Perubahan melibatkan suatu transformasi struktural..Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak adanya globalisasi memasuki. Era revolusi Industri 4.0 yang digunakan untuk merujuk dimana terjadi perpaduan teknologi yang mengakibatkan dimensi fisik, biologis, dan digital yang membentuk suatu perpaduan yang sulit untuk dibedakan (Scawab, 2016), menunjukkan antar manusia saling berbagi informasi secara langsung dengan bantuan digital tanpa harus berada pada tempat yang sama atau pada waktu yang bersamaan baik secara fisikis maupun biologis., hal ini

sebagai wujud terjadinya digitalisasi informasi dan pemanfaatannya. Masyarakat saat ini menghadapi dilema yang memerlukan daya kekuatan dan daya juang dalam menghadapi situasi perubahan multidimensi ,

Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman dalam budaya, suku bangsa, agama yang perlu dipelihara, karena struktur demografis dan keberagaman tersebut terdapat potensi konflik. Kerukunan dan nilai persatuan perlu di pahami , di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai kewajiban warga negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, yang muaranya pada kondisi kokoh yang berbentuk sikap kewarganegaraan *civic disposition*. watak kewarganegaraan merupakan salah satu komponen pendidikan sebagai watak, sikap, atau karakter kewarganegaraan.

Watak kewarganegaraan (*civic disposition*) mengisyaratkan pada karakter *public* maupun *privat* yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.(Udin S.Winataputra,2012:23) Watak-watak warganegara sebagaimana kecakapan kewarganegaran, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajarinya dan pernah dialami seseorang dirumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisas (*civil society*) maupun didalam kehidupan masyarakat. *Civic disposition* merupakan salah satu komponen pendidikan kewarganegaraan. *Civic disposition* di artikan sebagai, watak, sikap, atau karakter kewarganegaraan. Ada juga yang menyebutkan sebagai nilai kewarganegaraan (*civic value*) (Winarno, 2013:177) Oleh karena itu *Civic disposition* sebagai karakter *privat* dan *public*. Dimana karakter *public* adalah watak-watak yang telah dimiliki individu dengan cara belajar dan karakter *public* muncul karena seorang individu berinteraksi dengan individu yang lain. Watak-watak kewarganegaraan meliputi kesopanan, menghormati hak individu orang lain, patuh kepada hukum, jujur, membuka pikiran, berfikir kritis, negoisasi dan kompromi, gigih, belas kasih, patriotis, keberanian, toleransi.

Melalui pemahaman nilai persatuan yang memiliki makna “bersatunya berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi” maka persatuan bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai persatuan bangsa / negara yang menduduki wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Pada masa perjuangan kemerdekaan .Persatuan Indonesia merupakan faktor kunci yaitu sebagai sumber motivasi, semangat dan penggerak perjuangan Indonesia. Pada saat ini telah terjadi penurunan nilai karakter kewarganegaraan di kalangan masyarakat , hal ini yang dapat memunculkan sikap egois dan fundamentalis yang berujung tindakan negatif.

Perkembangan *industry* sangat cepat dan membawa dampak yang luas di segala bidang, revolusi industri 4.0 telah dapat dirasakan di berbagai bidang kehidupan meskipun berjalan belum terlalu lama. Setidaknya ada lima dampak revolusi industri 4.0 yang dapat dilihat yaitu dampak terhadap individu, masyarakat, bisnis, nasional dan global serta ekonomi. Dampak terhadap individu adalah bahwa industri 4.0 dapat mempengaruhi karakter, moral, etika hubungan antar manusia. Kombinasi *system* komputasi dan komunikasi memungkinkan terjadinya *system* komunikasi personal tanpa dialog impersonal yang disertai pemikiran dan perasaan sesama individu. Sebaliknya yang terjadi adalah perbincangan dan keputusan yang diatur oleh *system* mekanik dan digitalisasi. Relasi kemanusiaan terdegradasi oleh *system* digital yang mengatur proses komunikasi antar personal. Fenomena semacam ini pertanda terjadinya gejala semakin merendahnya derajat manusia (dehumanisasi) yang dijauhkan dari nilai-nilai etik, moral dan agama (Widisuseno, Iriyanto dan Susanto, Heru, 2019)

Civic dispositon sebagai watak kewarganaan negara belum secara maksimal terrealisasi karena terdapat kendala serta kurangnya sensitifitas masyarakat terhadap pemahaman nilai persatuan yang yang pada akhirnya dapat melunturkan nilai-nilai karakter .

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat permasalahan yaitu bagaimana “ *Revitalisasi Civic Disposition* dalam Memperkuat Persatuan di Era Revolusi Industri”

C. PEMBAHASAN

1. Globalisasi dan Revolusi Industri

Revolusi Industri 4.0 adalah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem siber-fisik, internet untuk segala, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Industri 4.0 menghasilkan "pabrik cerdas". Di dalam pabrik cerdas berstruktur modular, sistem siber-fisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat. Lewat Internet untuk segala (IoT), sistem siber-fisik berkomunikasi dan bekerja sama satu sama lain dan manusia secara bersamaan. Lewat komputasi awan, layanan internal dan lintas organisasi disediakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak di dalam rantai nilai (Slamet Rosyadi, 2019).

Industri 4.0 sebagai fase revolusi teknologi mengubah cara beraktivitas manusia dalam skala, ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup sebelumnya. Manusia bahkan akan hidup dalam ketidakpastian (*uncertainty*) global. Oleh karena itu, manusia harus memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan yang berubah sangat cepat. Tiap

negara harus merespon perubahan tersebut secara terintegrasi dan komprehensif. Respon tersebut melibatkan seluruh pemangku kepentingan politik global, mulai dari sektor publik, swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil sehingga tantangan industri 4.0 dapat dikelola menjadi peluang (Yahya Muhamat, 2018 : 6) Istilah Industri 4.0 lahir dari ide revolusi industri ke empat. European Parliamentary Research Service dalam Davies (2015) menyampaikan bahwa revolusi industri terjadi empat kali. Revolusi industri pertama terjadi di Inggris pada tahun 1784 di mana penemuan mesin uap dan mekanisasi mulai menggantikan pekerjaan manusia. Revolusi yang kedua terjadi pada akhir abad ke-19 di mana mesin-mesin produksi yang ditenagai oleh listrik digunakan untuk kegiatan produksi secara massal. Penggunaan teknologi komputer untuk otomatisasi manufaktur mulai tahun 1970 menjadi tanda revolusi industri ketiga. Saat ini, perkembangan yang pesat dari teknologi sensor, interkoneksi, dan analisis data memunculkan gagasan untuk mengintegrasikan seluruh teknologi tersebut ke dalam berbagai bidang industri. Gagasan inilah yang diprediksi akan menjadi revolusi industri yang berikutnya. Angka empat pada istilah Industri 4.0 merujuk pada revolusi yang ke empat. Industri 4.0 merupakan fenomena yang unik jika dibandingkan dengan tiga revolusi industri yang mendahuluinya. Industri 4.0 diumumkan secara apriori karena peristiwa nyatanya belum terjadi dan masih dalam bentuk gagasan (Drath dan Horch, 2014).

Pengertian yang lebih teknis disampaikan oleh Kagermann dkk (2013) bahwa Industri 4.0 adalah integrasi dari *Cyber Physical System* (CPS) dan *Internet of Things and Services* (IoT dan IoS) ke dalam proses industri meliputi manufaktur dan logistik serta proses lainnya. CPS adalah teknologi untuk menggabungkan antara dunia nyata dengan dunia maya. Penggabungan ini dapat terwujud melalui integrasi antara proses fisik dan komputasi (teknologi embedded computers dan jaringan) secara *close loop* (Lee, 2008). Hermann dkk (2015) menambahkan bahwa Industri 4.0 adalah istilah untuk menyebut sekumpulan teknologi dan organisasi rantai nilai berupa smart factory, CPS, IoT dan IoS. *Smart factory* adalah pabrik modular dengan teknologi CPS yang memonitor proses fisik produksi kemudian menampilkannya secara virtual dan melakukan desentralisasi pengambilan keputusan. Melalui IoT, CPS mampu saling berkomunikasi dan bekerja sama secara real time termasuk dengan manusia.

IoS adalah semua aplikasi layanan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap pemangku kepentingan baik secara internal maupun antar organisasi. Terdapat enam prinsip desain Industri 4.0 yaitu *interoperability*, *virtualisasi*, *desentralisasi*, kemampuan *real time*, berorientasi layanan dan bersifat modular. Berdasar beberapa penjelasan di atas, Industri 4.0 dapat diartikan sebagai era industri di mana seluruh entitas yang ada di dalamnya dapat saling berkomunikasi secara real time kapan saja dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi internet dan CPS guna mencapai tujuan tercapainya kreasi nilai baru ataupun optimasi nilai yang sudah ada dari setiap proses di industri.

Dalam menyongsong era baru Revolusi Industri 4.0 diperlukan kemampuan dasar yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh warga negara, pertama *Life Skills* yang membekali untuk bisa memahami dirinya dan tanggung jawab lingkungan sosial, kedua *Learning and Inovation Skills* yang membekali untuk kreatif dan berpikir kritis dan berkolaborasi, berkomunikasi, ketiga *Literasi Skills*.

2. Revitalisasi *Civic disposition* dan Persatuan

Civic disposition berkaitan dengan *civic paticipan* (partisipasi kewarganegaraan) karena dalam menghadapi era industry 4.0 yang semakin maju, butuh kerjasama atau persatuan antar individu sehingga hambatan serta tantangan di era industry dapat diselesaikan dengan Bersama, *Civic disposition* selalu di kaitkan dengan mata pelajaran (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) yang ada di sekolah). Akan tetapi *Civic disposition* juga bisa diperoleh dari perilaku atau kebiasaan yang ada di masyarakat yang sudah ada batasannya yaitu norma atau aturan. Dalam membangun watak warganegara (*civic disposition*) merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga eksistensi suatu bangsa atau negara. Maka, tidak mengherankan jika sejak awal Indonesia merdeka telah menekankan prinsip berdaulat politik, berdiri di kaki sendiri (berdikari) dalam ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan. Akan tetapi hingga saat ini karakter warganegara belum secara maksimal, seperti banyaknya perilaku warganegara yang menyimpang dari nilai-nilai moral dan norma yang sesuai dengan kepribadian bangsa ini.

Cara mewujudkan persatuan yaitu dengan mengubah sudut pandang dengan cara melihat perbedaan sebagai keberagaman yang justru memperkuat bangsa bukan melemahkan, Mengembangkan sifat kekeluargaan, menguatkan jiwa gotong-royong serta mengutamakan musyawarah adalah cara terbaik memperkuat persatuan dan kesatuan. Menyadari bahwa persatuan adalah syarat mutlak yang diperlukan sebuah Negara untuk mewujudkan cita-cita bersama yakni kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur, Konsep persatuan ini terlihat dari semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Secara mendalam Bhineka Tunggal Ika memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya namun tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Dipersatukan dengan bendera, lagu kebangsaan, mata uang, bahasa dan lain-lain yang sama. Jadi rakyat Indonesia pada dasarnya harus mempunyai konsep persatuan dan kesatuan didirinya masing-masing, karena dengan konsep persatuan dan kesatuan inilah rakyat Indonesia bias menjalankan kehidupannya dengan sejahtera dan makmur, karena tidak

mempermasalahkan perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan tersebut menjadi salah satu keunikan negara Indonesia.

Hal-hal yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan apabila dikaji lebih jauh, terdapat beberapa prinsip yang juga harus kita hayati serta kita pahami lalu kita amalkan. Prinsip-prinsip itu adalah:

1. Prinsip Bhineka Tunggal Ika

Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia.

2. Prinsip Nasionalisme Indonesia

Kita mencintai bangsa kita, tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Prinsip Kebebasan yang Bertanggung jawab

Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang maha Esa.

4. Prinsip Wawasan Nusantara

Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu manusia Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional.

Penguatan *Civic disposition* sangat mempengaruhi perilaku atau tingkah laku masyarakat khususnya generasi muda yang masih labil dalam berfikir. Sehingga mempengaruhi hubungan dengan lingkungan sekitar. Persatuan yang tercermin dalam bhineka tunggal ika juga menjadi dasar bagi generasi muda untuk lebih menghargai perbedaan, mengingat Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki beranekaragam suku, bahasa, dan budaya. Jadi tidak heran pentingnya persatuan dalam suatu Negara itu sangat penting terutama saat menghadapi Era Industri 4.0.

Era Industri 4.0 berkembang seiring perkembangan zaman, Salah satu pengaruh yang mendasari berkembangnya Era Industri yaitu teknologi. Perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan rasa saling peduli satu sama lain, karena dengan sifat saling peduli akan menumbuhkan rasa persatuan, sehingga penyebaran *Hoax* atau beita-berita tidak benar serta isu-isu sara tidak menyebar ke masyarakat.

Dampak adanya era industri 4.0 yaitu banyaknya kesenjangan social yang disebabkan angka pengangguran karena tidak siap dalam menghadapi era industry yang semakin mendominasi elemen kehidupan masyarakat,

C. KESIMPULAN

Perkembangan kehidupan manusia akibat Globalisasi dan Revolusi Industri menimbulkan berbagai dampak. Problem yang muncul akibat dampak negatif memicu fenomena baru yang kadang tidak sepaham dengan regulasi yang ada. Dalam merawat keutuhan NKRI dan menciptakan keharmonisan masyarakat dalam keberagaman diperlukan tatanan mental, watak kewarganegaraan yang tinggi. *Civic disposition* sebagai perwujudan dan terobosan Pendidikan dan Pengetahuan Kewarganegaraan yang mengedepankan nilai – nilai karakter.

Dinamika Globalisasi dan Isu yang kontemporer melalui berbagai macam media seharusnya dapat diminimalisir dengan integrasi dan internalisasi pemahaman nilai dan pengetahuan kewarganegaraan, oleh karena itu perlu komitmen Bersama untuk memperkokoh eksistensi negeri ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Makmur Kartawinata. (1999). *Persatuan dan Kesatuan Bangsa: Suatu renungan Pembentukan Indonesia Merdeka Ke Arah Kebudayaan Kebangsaan*. Bandung: Primaco Akademika.
- Koento Wibisono, (2006), *Revitalisasi dan Reorientasi MPK*, Makalah Smnas III MPK,
- Branson, M. S. (1998). *The Role of Civic Education: A Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper from the Communitarian Network*. [Online]. Tersedia:http://www.civiced.org/papers/articles_role.html
- Budimansyah, D. dan Suryadi, K. (2008). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Cogan, J. J. and Derricott, R. (1998). *Citizenship for 21st Century: an International Perpektif on Education*. London: Cogan Page.

- Komalasari, K. (2008). Pengaruh Pembelajaran Kontekstual dalam Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Kompetensi Kewarganegaraan. (Disertasi). UPI Bandung.
- Manullang, B. 2013. Grand Desain Pendidikan Karakter Generasi Emas 2045. *Jurnal Pendidikan Karakter*. (Online), No. 1, Tahun III, Februari 2013.
- Remaja di Indonesia Rentan Berperilaku Tidak Sehat. [Online]. Tersedia di <http://beritasore.com/2010/07/05/separuh-dari-63-juta-jiwa-remaja-di-indonesia-rentanberprilaku-tidak-sehat/>. Diakses 12 November 2017.
- Samani, M dan Hariyanto. (2013). Pendidikan Karakter. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Setiawan, D. (2013). Peran Pendidikan Karakter Dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral. *Jurnal Pendidikan Karakter*. (Online), No. 1, Tahun III, Februari 2013.
- Sudrajat, A. (2011). Mengapa Pendidikan Karakter?. *Jurnal Pendidikan Karakter*. (Online), No. 1, Tahun I, Oktober 2011.
- Wening, S. (2012). Pembentukan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Nilai. *Jurnal Pendidikan Karakter*. (Online), No. 1, Tahun II, Februari 2012. Winarni, S. (2013).